

BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR **10** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

*R  
P  
P*

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

f/f

2. Ketentuan Pasal 3

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp1.521.163.569.226,31 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah koma tiga satu sen) bertambah sejumlah Rp16.558.518.580,74 (seratus enam belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) sehingga menjadi Rp1.637.722.087.807,05 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah koma nol lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

(1)	Pendapatan		
	a. Pendapatan		
	1. Semula	Rp 1.469.088.373.506,31	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 82.625.419.594,59</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 1.551.713.793.100,90
	b. Belanja		
	1. Semula	Rp 1.489.163.569.226,31	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 136.558.518.580,74</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 1.625.722.087.807,05
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		<u>Rp (74.008.294.706,15)</u>
(2)	Pendapatan		
	a. Pajak daerah		
	1. Semula		
	2. Bertambah/(berkurang)		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		
	1. Semula	Rp 52.075.195.720,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 33.933.098.986,15</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 86.008.294.706,15
	2. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp 32.000.000.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (20.000.000.000,00)</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 12.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp 74.008.294.706,15</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana bagi hasil		
1. Semula	Rp 28.486.594.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (10.727.294.000,00)</u>	Rp 17.759.300.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		
b. Dana alokasi umum		
1. Semula	Rp 782.647.725.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	Rp 782.647.725.000,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		
c. Dana alokasi khusus		
1. Semula	Rp 192.366.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	Rp 192.366.000.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		
d. Dana alokasi khusus Non Fisik		
1. Semula	Rp 140.423.523.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	Rp 140.423.523.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil Pajak		
1. Semula	Rp 52.652.392.786,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.970.380.418,90</u>	Rp 54.622.773.204,90
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		
b. Pendapatan Lainnya		
1. Semula	Rp 26.250.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	Rp 26.250.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
c. Dana Desa		
1. Semula	Rp 109.766.845.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.731.902.000,00</u>	Rp 111.498.747.000,00
Jumlah Dana Desa		
d. Hibah		
1. Semula	Rp 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 57.974.904.900,00</u>	Rp 57.974.904.900,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		

f p f

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp 821.018.601.809,31	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.300.329.319,74</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp 852.318.931.129,05
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp 668.144.967.417,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 105.258.189.261,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp 773.403.156.678,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp 554.815.751.959,31	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 23.037.609.919,74</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp 577.853.361.879,05
b. Belanja bunga		
1. Semula	Rp 1.110.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (981.800.000,00)</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp 128.200.000,00
c. Belanja hibah		
1. Semula	Rp 61.653.208.550,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.145.682.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp 62.798.890.550,00
d. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp 1.990.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp 1.990.000.000,00
e. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp 19.110.696.200,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.842.718.400,00)</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp 14.267.977.800,00

*f P f*

f. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp 181.838.945.100,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 12.941.555.800,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp 194.780.500.900,00
g. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp 500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp 500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp 59.329.998.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 16.688.611.500,00</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp 76.018.609.500,00
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp 299.923.520.590,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 72.631.732.408,00</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp 372.555.252.998,00
c. Belanja modal		
1. Semula	Rp 308.891.448.827,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.937.845.353,00</u>	
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp 324.829.294.180,00
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :		
	Pasal 5	
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:		
a. Penerimaan sejumlah		
1. Semula	Rp 52.075.195.720,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 33.933.098.986,15</u>	
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp 86.008.294.706,15

R  
P  
f

- b. Pengeluaran sejumlah
- |                          |    |                                      |                      |
|--------------------------|----|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Semula                | Rp | 32.000.000.000,00                    |                      |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(20.000.000.000,00)</u>           |                      |
|                          |    | Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp 12.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- |                          |    |  |                      |
|--------------------------|----|--|----------------------|
| 1. Semula                | Rp | 52.075.195.720,00  |                      |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>33.933.098.986,15</u>                                 |                      |
|                          |    | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp 86.008.294.706,15 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
- |                          |    |   |                     |
|--------------------------|----|---|---------------------|
| 1. Semula                | Rp | 1.000.000.000,00  |                     |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u>   |                     |
|                          |    | Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | Rp 1.000.000.000,00 |
- b. Pembayaran pokok utang sejumlah
- |                          |    |  |                      |
|--------------------------|----|--|----------------------|
| 1. Semula                | Rp | 31.000.000.000,00  |                      |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(20.000.000.000,00)</u>                                       |                      |
|                          |    | Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan | Rp 11.000.000.000,00 |

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

*r*  
*flr*



4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
  11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
  13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

f f r



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 19 Oktober 2018  
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

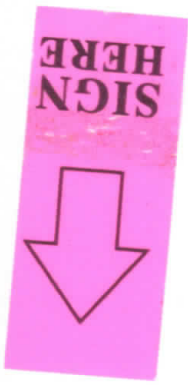
ODANG PRASETYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (10/2018)

Di tetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI





**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.469.088.373.506,31	1.551.713.793.100,90	82.625.419.594,59	5,62	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	136.495.293.720,31	168.170.819.996,00	31.675.526.275,69	23,21	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	95.450.000.000,00	112.177.216.000,00	16.727.216.000,00	17,52	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	7.706.961.285,31	8.414.833.500,00	707.872.214,69	9,18	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.548.578.290,00	4.118.712.047,00	(429.866.243,00)	(9,45)	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.789.754.145,00	43.460.058.449,00	14.670.304.304,00	50,96	
1.1.1.4		1.143.923.842.000,00	1.133.196.548.000,00	(10.727.294.000,00)	(0,94)	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	28.486.594.000,00	17.759.300.000,00	(10.727.294.000,00)	(37,66)	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	782.647.725.000,00	782.647.725.000,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	332.789.523.000,00	332.789.523.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	188.669.237.786,00	250.346.425.104,90	61.677.187.318,90	32,69	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0,00	57.974.904.900,00	57.974.904.900,00	0,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	52.652.392.786,00	54.622.773.204,90	1.970.380.418,90	3,74	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.250.000.000,00	26.250.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	109.766.845.000,00	111.498.747.000,00	1.731.902.000,00	1,58	
1.3.7	Dana Desa					
2	<b>BELANJA</b>	1.489.163.569.226,31	1.625.722.087.807,05	136.558.518.580,74	9,17	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	821.018.601.809,31	852.318.931.129,05	31.300.329.319,74	3,81	
2.1.1	Belanja Pegawai	554.815.751.959,31	577.853.361.879,05	23.037.609.919,74	4,15	
2.1.2	Belanja Bunga	1.110.000.000,00	128.200.000,00	(981.800.000,00)	(88,45)	
2.1.4	Belanja Hibah	61.653.208.550,00	62.798.890.550,00	1.145.682.000,00	1,86	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.110.696.200,00	14.267.977.800,00	(4.842.718.400,00)	(25,34)	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	181.838.945.100,00	194.780.500.900,00	12.941.555.800,00	7,12	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	668.144.967.417,00	773.403.156.678,00	105.258.189.261,00	15,75	
2.2.1	Belanja Pegawai	59.329.998.000,00	76.018.609.500,00	16.688.611.500,00	28,13	

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299.923.520.590,00	372.555.252.998,00	72.631.732.408,00	24,22
2.2.3	Belanja Modal	308.891.448.827,00	324.829.294.180,00	15.937.845.353,00	5,16
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(20.075.195.720,00)	(74.008.294.706,15)	(53.933.098.986,15)	268,66
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	52.075.195.720,00	86.008.294.706,15	33.933.098.986,15	65,16
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.075.195.720,00	86.008.294.706,15	33.933.098.986,15	65,16
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	32.000.000.000,00	12.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(62,50)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	31.000.000.000,00	11.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(64,52)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	20.075.195.720,00	74.008.294.706,15	53.933.098.986,15	268,66
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Sungai Raya, 19 Oktober 2018

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 19 Oktober 2018  
PAL SIKHETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DDANG PISA SEPTI  
LEWAT... KABUPATEN KUBU RAYA  
TANGGAL... 2018